



LURAH WUNUNG
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN WUNUNG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022



KALURAHAN WUNUNG
KAPANEWON WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
TAHUN 2023



LURAH WUNUNG
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN WUNUNG
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WUNUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kalurahan Wunung Nomor Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
18. Peraturan Kalurahan Wunung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Desa Wunung Tahun 2022 Nomor 2);
20. Peraturan Kalurahan Wunung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Wunung Tahun 2022 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WUNUNG
dan
LURAH WUNUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**PERATURAN KALURAHAN WUNUNG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2022**

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.193.714.721,00
2. Belanja Kalurahan		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	731.963.622,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	938.837.814,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	15.535.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	118.119.480,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	391.450.000,00
Jumlah Belanja Kalurahan	Rp.	2.195.905.916,00
Surplus / (Defisit)	Rp.	(2.191.195,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	102.049.184,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	99.857.989,00
Silpa Tahun Berjalan	Rp.	99.857.989,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari :

- Lampiran I : Laporan Keuangan
- Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari - 31 Desember Tahun Anggaran 2022
- Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke Desa

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik.



Ditetapkan di
pada tanggal

: Wunung
: 30 Januari 2023

Diundangkan di : Wunung
pada tanggal : 30 Januari 2023

CARIK

MAR'ATUS' SHOLIAH

LEMBARAN KALURAHAN WUNUNG TAHUN 2023 NOMOR |

**LAPORAN REALISASI APB KALURAHAN
PEMERINTAH KALURAHAN WUNUNG
KAPANEWON WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2022**

	Ref	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa	C2	Rp 16.350.000	Rp 6.328.000	Rp (10.022.000)
Pendapatan Transfer		Rp 2.164.552.700	Rp 2.165.835.200	Rp 1.282.500
Dana Desa	C3	Rp 906.141.000	Rp 906.141.000	Rp -
Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah	C4	Rp 65.183.800	Rp 69.771.700	Rp 4.587.900
Alokasi Dana Desa	C5	Rp 598.227.900	Rp 594.922.500	Rp (3.305.400)
Bantuan Keuangan Provinsi	C6	Rp 63.000.000	Rp 63.000.000	Rp -
Bantuan Keuangan Kabupaten	C7	Rp 532.000.000	Rp 532.000.000	Rp -
Pendapatan Lain	C8	Rp 22.325.264	Rp 21.551.521	Rp (773.743)
JUMLAH PENDAPATAN		Rp 2.203.227.964	Rp 2.193.714.721	Rp (9.513.243)
BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	C9 dan C15	Rp 804.879.591	731.963.622,0	Rp (72.915.969)
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C10 dan C15	Rp 966.397.814	Rp 938.837.814	Rp (27.560.000)
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	C11 dan C15	Rp 17.285.264	Rp 15.535.000	Rp (1.750.264)
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	C12 dan C15	Rp 124.874.480	Rp 118.119.480	Rp (6.755.000)
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	C13 dan C15	Rp 391.450.000	Rp 391.450.000	Rp -

JUMLAH BELANJA	Rp	2.304.887.149	Rp	2.195.905.916	Rp	(108.981.233)
SURPLUS/(DEFISIT)	Rp	(101.659.185)	Rp	(2.191.195)		99.467.990,0
PEMBIAYAAN						
						C16
Penerimaan Pembiayaan	Rp	101.659.185	Rp	102.049.184	Rp	(389.999)
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	-	Rp	-	Rp	-
SELISIH PEMBIAYAAN	Rp	101.659.185	Rp	102.049.184	Rp	(389.999)
SILPA TAHUN BERJALAN	Rp	-	Rp	99.857.989		99.857.989

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PAMONG KALurahan WUNUNG
KAPANEWOR WONGSARI, KABUPATEN GURUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2022**

Informasi Umum

Pemerintah Kabupaten Wungu merupakan Kabupaten di Kabupaten Wongsari, Kabupaten Gunungkidul. Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 141/222/PG/KPTS/2021 Tanggal 16 Desember 2021, saat ini kepemimpinan Pemerintahan Kabupaten Wungu

1. Lurah : Sudarta
2. Carik : Mar'otus' Sridish
3. Danuta : Tri Subekti

Kantor Pemang berada di Balai Kulkah Kabupaten Wungu, Kabupaten Wongsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Keuangan berupa Laporan Realisasi APBD/keuangan semua basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendayagunaan dasar pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan belanja dicatat pada saat kas dibayarkan dan telah bernilai definitif.

Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonstruksi SILPA dan Kas

SILPA Tahun Anggaran 2022				Rp	99.857.989,00
Mutasi Potongan Pajak					
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara					
- Penertamaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	Rp	113.665.340			
- Saldoan Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	Rp	(113.665.340)			
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	Rp	-			
Saldo Kas per 31 Desember 2022				Rp	99.857.989,00

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/Kurang)
a. Hasil Usaha	Rp -	Rp -	Rp -
b. Hasil Ane	Rp 16.350.000	Rp 6.328.000	Rp (10.022.000)
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong	Rp -	Rp -	Rp -
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	Rp -	Rp -	Rp -
Rp	16.350.000	6.328.000	(10.022.000)

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penertamaan desa yang diperoleh dari APESM. Jumlah penertamaan Dana Desa selama tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/Kurang)
Tahap 1	Rp 209.816.400	Rp 209.816.400	Rp -
Tahap 2	Rp 209.816.400	Rp 209.816.400	Rp -
Tahap 3	Rp 104.908.200	Rp 104.908.200	Rp -
BLT Tahap 1	Rp 95.400.000	Rp 95.400.000	Rp -
BLT Tahap 2	Rp 95.400.000	Rp 95.400.000	Rp -
BLT Tahap 3	Rp 95.400.000	Rp 95.400.000	Rp -
BLT Tahap 4	Rp 95.400.000	Rp 95.400.000	Rp -
Rp	906.141.000	906.141.000	-

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

a. Penertamaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/Kurang)
Tahap 1	Rp 43.179.900	Rp 24.473.250	Rp (18.706.650)
Tahap 2	Rp 22.003.900	Rp 14.277.600	Rp (7.726.300)
Rp	65.183.800	38.750.850	(26.432.950)

b. Penertamaan Desa dari keberuntungan bagian hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya adalah:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/Kurang)
Tahap 1	Rp 16.237.300	Rp 31.020.850	Rp (14.783.550)
Rp	16.237.300	31.020.850	(14.783.550)

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penertamaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/Kurang)
Tahap 1	Rp 49.852.325	Rp 49.587.050	Rp (265.275)
Tahap 2	Rp 49.852.325	Rp 49.587.050	Rp (265.275)
Tahap 3	Rp 49.852.325	Rp 49.587.050	Rp (265.275)
Tahap 4	Rp 49.852.325	Rp 49.587.050	Rp (265.275)
Tahap 5	Rp 49.852.325	Rp 49.587.050	Rp (265.275)
Tahap 6	Rp 49.852.325	Rp 49.587.050	Rp (265.275)
Tahap 7	Rp 49.852.325	Rp 49.587.050	Rp (265.275)

Talup 8	Rp	49.852.325	Rp	49.587.050	Rp	(265.275)
Talup 9	Rp	49.852.325	Rp	49.587.050	Rp	(265.275)
Talup 10	Rp	49.852.325	Rp	49.555.550	Rp	(296.775)
Talup 11	Rp	49.852.325	Rp	49.555.550	Rp	(296.775)
Talup 12	Rp	49.852.325	Rp	49.555.450	Rp	(292.875)
	Rp	298.227.900	Rp	294.922.500	Rp	(3.305.400)

Salah satu anggaran ADD dan perencanaan selanjut pada satu persen gaji buruh dan pemang untuk bulan Agustus

Salah satu Desember yang telah dipotong langsung oleh BKAD sehingga jumlah yang seharusnya ke rekening akan selanjut.

Salah satu 1 persen dari gaji tersebut telah dibetokan oleh BKAD untuk membayar tagihan BPJS kesehatan buruh dan pemang yang menjadi kewajiban buruh dan pemang yang terdapat pada setiap buruh dan pemang, oleh karenanya pada realisasi setiap gaji terdapat selanjut 1 persen

4. Bantuan Keuangan Provinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi adalah:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	Rp 63.000.000	Rp 63.000.000	-
	Rp 63.000.000	Rp 63.000.000	-

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota adalah:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	Rp 532.000.000	Rp 532.000.000	-
	Rp 532.000.000	Rp 532.000.000	-

8. Pendapatan Lain

Pendapatan lain terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa		Rp -	Rp -
Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga		Rp -	Rp -
Penerimaan bantuan dari perusahaan yang berlokasi di Desa	Rp 5.000.000	Rp 5.500.000	Rp (500.000)
kereski kesalahan belanja tahun-tahun sebelumnya	Rp 10.725.264	Rp 10.725.264	Rp -
Hutang Bank	Rp 3.000.000	Rp 1.726.257	Rp 1.273.743
Lain-lain pendapatan desa yang sah	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	Rp -
	Rp 23.325.264	Rp 21.551.521	Rp 773.743

9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Belanja Pegawai	Rp 532.574.285	Rp 531.619.272	Rp 954.963
Belanja Barang dan Jasa	Rp 209.350.706	Rp 137.429.700	Rp 71.961.006
Belanja Modal	Rp 62.914.650	Rp 62.914.650	Rp -
	Rp 804.839.591	Rp 731.963.622	Rp 72.915.969

10. Belanja - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Belanja Barang dan Jasa	Rp 174.194.736	Rp 147.394.736	Rp (26.800.000)
Belanja Modal	Rp 792.203.078	Rp 791.443.078	Rp (760.000)
	Rp 966.397.814	Rp 938.837.814	Rp (27.560.000)

11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Belanja Barang dan Jasa	Rp 17.285.264	Rp 15.535.000	Rp (1.750.264)
Belanja Modal	Rp -	Rp -	Rp -
	Rp 17.285.264	Rp 15.535.000	Rp (1.750.264)

12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Belanja Barang dan Jasa	Rp -	Rp -	Rp -
Belanja Modal	Rp 124.874.480	Rp 118.119.480	Rp (6.755.000)
	Rp 124.874.480	Rp 118.119.480	Rp (6.755.000)

13. Belanja - Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Belanja untuk Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Belanja Tidak Terduga	Rp 391.450.000	Rp 391.450.000	Rp -
	Rp 391.450.000	Rp 391.450.000	Rp -

14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 54.444.400	Rp 54.000.400	Rp (378.000)
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 397.012.200	Rp 396.461.220	Rp (550.980)
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 27.167.625	Rp 27.141.652	Rp (25.983)
Tunjangan BPJ	Rp 53.950.000	Rp 53.950.000	Rp -
	Rp 832.574.225	Rp 831.619.272	Rp (954.963)

Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Barang Perencanaan	Rp. 103.713.594	Rp. 73.949.166	Rp. (29.764.428)
Belanja Jasa Honorarium	Rp. 163.545.000	Rp. 145.100.000	Rp. (18.445.000)
Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 3.900.000	Rp. 4.100.000	Rp. (1.800.000)
Belanja Jasa Sewa	Rp. 3.100.000	Rp. 3.100.000	Rp. -
Belanja Operasional Perencanaan	Rp. 42.635.391	Rp. 20.606.773	Rp. (22.028.618)
Belanja Pemeliharaan	Rp. 4.600.000	Rp. 500.000	Rp. (4.100.000)
Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan kepada Masyarakat	Rp. 154.750.000	Rp. 123.598.000	Rp. (31.152.000)
Belanja Modal	Rp. -	Rp. -	Rp. -
Belanja Modal Pengadaan Perakitan, Mesin dan	Rp. 131.083.850	Rp. 130.783.850	Rp. (300.000)
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	Rp. 589.271.578	Rp. 588.811.578	Rp. (460.000)
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	Rp. 169.679.000	Rp. 169.679.000	Rp. -
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	Rp. -	Rp. -	Rp. -
Belanja Modal Lainnya	Rp. -	Rp. -	Rp. -
Belanja Tidak Terdaftar	Rp. 391.450.000	Rp. 391.450.000	Rp. -
Belanja Tidak Terdaftar	Rp. 391.450.000	Rp. 391.450.000	Rp. -

15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Pungut)

	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Belang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
Sub Bidang Belanja Nilitap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Rp. 633.330.200,00	Rp. 621.834.622	Rp. (11.495.578)
Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana	Rp. 90.273.391,00	Rp. 69.600.000	Rp. (20.673.391)
Sub Bidang Pengelolaan Administrasi	Rp. 23.342.000	Rp. 14.312.000	Rp. (9.030.000)
Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Desa	Rp. 58.932.000	Rp. 28.107.000	Rp. (30.825.000)
Sub Bidang Pertumbuhan	Rp. -	Rp. -	Rp. -
Belanja - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
Sub Bidang Pendidikan	Rp. 14.400.000	Rp. 12.000.000	Rp. (2.400.000)
Sub Bidang Kesehatan	Rp. 92.300.000	Rp. 67.000.000	Rp. (25.300.000)
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp. 637.197.814	Rp. 636.427.814	Rp. (770.000)
Sub Bidang Kawasan Permukiman	Rp. 222.900.000	Rp. 222.900.000	Rp. -
Sub Bidang Pariwisata	Rp. -	Rp. -	Rp. -
Belanja - Bidang Pembiayaan Kemasyarakatan Desa			
Sub Bidang Ketentraman, Kebersihan Umum, dan	Rp. 11.935.264	Rp. 11.935.000	Rp. (264)
Sub Bidang Kebersihan dan Keagamaan	Rp. -	Rp. -	Rp. -
Sub Bidang Kependudukan dan Keluarga	Rp. 1.300.000	Rp. 1.300.000	Rp. -
Sub Bidang Kemitraan Masyarakat	Rp. 4.150.000	Rp. 3.400.000	Rp. (750.000)
Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Sub Bidang Pertanian dan perikanan	Rp. 90.080.280	Rp. 83.325.280	Rp. (6.755.000)
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp. -	Rp. -	Rp. -
Sub Bidang Penanaman modal	Rp. -	Rp. -	Rp. -
Sub bidang perdagangan dan perindustrian	Rp. 34.794.388	Rp. 34.794.300	Rp. (88)
Belanja-Bidang Penanggulangan Bencana, darurat, dan mendesak desa			
Sub bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 9.850.000	Rp. 9.850.000	Rp. -
Sub bidang kradslan darurat	Rp. -	Rp. -	Rp. -
Sub bidang Keabhan mendesak	Rp. 381.600.000	Rp. 381.600.000	Rp. -
Belanja-Bidang Penanggulangan Bencana, darurat, dan mendesak desa	Rp. 391.450.000	Rp. 391.450.000	Rp. -

16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Penerimaan Pembiayaan	Rp. 101.659.185,00	Rp. 102.049.184	Rp. 389.999
Pengeluaran Pembiayaan	Rp. -	Rp. -	Rp. -
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :			
SELPA tahun anggaran sebelumnya	Rp. 101.659.185,00	Rp. 102.049.184	Rp. 389.999
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :			
	Rp. -	Rp. -	Rp. -
	Rp. -	Rp. -	Rp. -

silpa tahun 2021 dalam pechal pertanggungjawaban APBKad tahun anggaran 2021 sebesar Rp 172.300.034,00, silpa tersebut di dalamnya terbagus silpa kegiatan pembinaan juga wangs ke rekening kas Pemda DIY sebesar Rp 9.300.000 dan berupa kerugian Penkal Waning berdasarkan keputusan inkrab Pengalihan Tinggi DIY sebesar Rp 60.660.850, yang dibayarkan pada bulan Mei 2022

17. Aset Desa

Perubahan aset desa adalah sebagai berikut :

	2021	2022	Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah	Rp. -	Rp. -	-
Perakitan dan Mesin	Rp. 325.510.438	Rp. 283.424.132	Rp. (42.086.306)
Gedung	Rp. -	Rp. -	-

Gedung dan Bangunan	Rp	1.723.470.634	Rp	1.854.554.484	Rp	131.083.850
Jalan Jariagan dan Instalasi, jembatan	Rp	3.567.167.410	Rp	4.721.693.988	Rp	1.154.526.578
Aset tetap lainnya	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Konstruksi dalam pengerjaan	Rp	-	Rp	-	Rp	-
	Rp	5.616.148.483	Rp	6.861.672.604	Rp	1.245.524.122

ada penambahan aset dari hibah berupa bilik stan dengan berita acara nomor 028/259/Ins/XI/2022, Berita acara penanaman NOMOR : 1443.VIII/BAST/Ch15-4/AM/2022 serta ada penghapusan aset sejumlah Rp 47.096.418,00 dengan nomor SK 32/KPTS/2022

18. **Persediaan Modal Desa**

Persediaan Modal Desa pada BUMDesa adalah sebagai berikut :

	2021	2022	Perubahan/	(Pengurangan)
BUMDesa Bangkit	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Rp -	Rp -	Rp -	-

PEMERINTAH KABUPATEN WURUBO
KAPAREWON WONOMARU, KABUPATEN GEBUNGREJO
KONCIAN ARSET TRYAP KALUDRAMAN
PER 31 DESEMBER 2023

No.	Klas Ases dan Nama/Identitas Ases Tetap	Bukti Kegermibahan	Kode Ases Tetap	Tahun	Nilai Perolehan	Kondisi	Bomus	Tanggal Perolehan	Kas.
1.	Peralatan dan Mesin Alas Angkutan								
a.	SFM	BAST	1.3.2.02.04	2004	3.000.000	B	001	14/09/2014	Hilang
2.	Alas Bungalow dan Alat Ukur								
3.	Alat Kantor dan Binah Tanggul								
a.	Kursi besi		1.3.2.06.03	1995	2.000.000	B	001-285	31/12/1995	
b.	Meja besi		1.3.2.06.05	1995	400.000	B	001-010	31/12/1995	
c.	Kursi besi		1.3.2.06.05	2006	1.000.000	B	001-100	31/12/2006	
d.	Meja besi		1.3.2.06.05	2006	400.000	B	001-010	31/12/2006	
e.	Isolasi kaliumet		1.3.2.06.05	1997	1.000.000	B	001	31/12/1997	
f.	Meja kursi besi		1.3.2.06.05	1997	600.000	B	001	31/12/1997	
g.	Meja kursi kayu		1.3.2.06.05	2007	1.000.000	B	001	31/12/2007	
h.	Meja kayu		1.3.2.06.05	2007	600.000	B	001-008	31/12/2007	
i.	Alas arsip		1.3.2.06.05	2007	500.000	B	001-010	31/12/2008	
j.	Kursi kayu		1.3.2.06.05	2007	250.000	B	001	31/12/2008	
k.	Alas kursi		1.3.2.06.05	2008	250.000	B	001	31/12/2008	
l.	Meja kayu		1.3.2.06.05	2011	300.000	B	001-008	31/12/2011	
m.	Kursi panjang		1.3.2.06.05	2011	400.000	B	001-006	31/12/2011	
n.	Dispenser		1.3.2.07.05	2011	110.000	B	001	31/12/2011	
o.	Tenda		1.3.2.11.01	2011	2.000.000	B	001	31/12/2011	
p.	Water tower		1.3.2.07.05	2012	750.000	B	001	31/12/2012	
q.	Pengapian air		1.3.2.07.05	2012	430.200	B	001	31/12/2012	
r.	Printer HP LaserJet		1.3.2.06.01	2013	500.000	B	001	30/5/2013	
s.	Meja kayu		1.3.2.07.01	2014	200.000	B	001	13/09/2014	
t.	Alas arsip		1.3.2.06.05	2013	2.000.000	B	001-002	09/09/2013	
u.	Alas arsip		1.3.2.07.04	2013	1.000.000	B	001-020	09/09/2013	
v.	Kursi kayu		1.3.2.06.05	2013	9.000.000	B	001	31/09/2013	
w.	Kursi kayu		1.3.2.06.05	2015	7.000.000	B	001-008	03/04/2015	
x.	Printer		1.3.2.11.02	2016	12.000.000	B	001	13/05/2016	
y.	Printer		1.3.2.07.01	2016	130.000	B	001	12/05/2016	
z.	Gas 12 kg		1.3.2.07.01	2015	450.000	B	001	12/07/2015	
aa.	Printer LaserJet		1.3.2.06.01	2017	8.800.000	B	001-003	13/12/2017	
ab.	Meja kayu		1.3.2.06.01	2018	10.000.000	B	001-005	28/4/2017	
ac.	Meja kayu		1.3.2.06.01	2018	2.500.000	B	001	17/4/2018	
ad.	Printer		1.3.2.06.01	2018	2.400.000	B	001	17/04/2018	
ae.	Wastafel		1.3.2.07.01	2018	500.000	B	001	16/10/2018	
af.	Dispenser		1.3.2.07.05	2018	500.000	B	001	16/10/2018	
ag.	Kursi kayu		1.3.2.06.05	2018	10.735.000	B	001-038	11/08/2018	
ah.	Meja aluminis		1.3.2.07.04	2019	1.500.000	B	001	31/12/2019	
ai.	Printer		1.3.2.06.01	2019	1.949.000	B	001	31/10/2019	
aj.	Dispenser		1.3.2.07.05	2019	25.000.000	B	001-014	31/12/2019	
ak.	Meja kayu		1.3.2.06.05	2019	3.000.000	B	001	31/12/2019	
al.	Meja kayu		1.3.2.06.05	2019	6.000.000	B	001-003	31/12/2019	

No	Jumlah bangunan	Spesifikasi	Luas (m ²)	Volume (m ³)	Estimasi Biaya (Rp)	Estimasi Waktu (Bulan)	Estimasi Biaya (Rp)	Estimasi Waktu (Bulan)	Estimasi Biaya (Rp)	Estimasi Waktu (Bulan)	Estimasi Biaya (Rp)	Estimasi Waktu (Bulan)
20	Jumlah bangunan											
21	Rehabilitasi gedung											
22	Rehabilitasi gedung											
23	Rehabilitasi gedung											
24	Rehabilitasi gedung											
25	Rehabilitasi gedung											
26	Rehabilitasi gedung											
27	Rehabilitasi gedung											
28	Rehabilitasi gedung											
29	Rehabilitasi gedung											
30	Rehabilitasi gedung											
31	Rehabilitasi gedung											
Jumlah												
1.854.564.484												
Jalan, jembatan, dan instalasi												
1.	Jalan Desa											
a.	Jalan perkeretaapian											
b.	Jalan perkeretaapian											
c.	Aspal											
d.	Aspal											
e.	Aspal											
f.	Drainase											
g.	Drainase											
h.	Aspal											
i.	Jalan perkeretaapian											
j.	Jalan perkeretaapian											
k.	Jalan perkeretaapian											
l.	Drainase											
m.	Drainase											
n.	Drainase											
o.	Drainase											
p.	Drainase											
q.	J U T											
r.	J U T											
s.	J U T											
t.	J U T											
u.	J U T											
v.	Jalan perkeretaapian											
w.	Telak Lejang											
x.	Telak Lejang											
y.	Coc Flut											
z.	J U T											
aa.	Drainase											
ab.	Drainase											
ac.	Telak											
ad.	Jalan perkeretaapian											
ae.	Dura listrik											
af.	Jalan perkeretaapian											
ag.	Aspal											
ah.	Jalan perkeretaapian											
ai.	Jalan perkeretaapian											
aj.	Jalan perkeretaapian											
ak.	Siturur bar											
al.	Drainase											
am.	PIT											
an.	Siturur bar											
ao.	J U T											
ap.	Jalan perkeretaapian											

TERTANGGUNG
 LAJIBAN PERTANGGUNGJAWABAN
 REALISASI ANGGARAN PERENCANAAN DAN KALDIKAMAH DESA
 TAHUN ANGGARAN 2022

LAPORAN REALISASI KEGIATAN
 PERIODE 01 JANUARI - 31 DESEMBER
 TAHUN ANGGARAN 2022

KALDIKAMAH : BUNTING
 KABUPATEN : MUKOMUKO
 KABUPATEN : GURUH
 DESA : DESA BUKITINEMBA KODUMAMUKO

KODE REKENING	K I B A T A W	NAMA KEGIATAN	BENTUK		MENGALOKASIKAN		MELAKSANAKAN		MENCAPAI		DANA TRANS (Rp)	AID (Rp)	Salah - Laki	PDB	PDB	REKES DANA	REKES Laki	
			Polisi	Barisan	Anggaran (Rp)	Volume	Barisan	Volume	Anggaran (Rp)	Capaian (%)								
2		KEKALDIKAMAH DESA																
2.1		Salah Prasyarat/Programas Pemas																
1.1.01		Perencanaan Program/Program Kerja	1	ok	794.884.100	40.370.000	13	ok	721.886.848	81,31%	48.279.000	877.613.800	8.179.488	48.844.200	24.790.000			88.000.000
1.1.02		dan Tercatat, Monev, Dem	135	ok	287.211.200	221	ok	45.073.000	99,00%	280.481.200		40.000.000						
1.1.03		dan Tercatat, Monev, Dem	180	ok	27.187.833,2	204	ok	27.141.633,3	99,80%			207.213.200						
1.1.04		Perencanaan Operasional	1	Polisi	70.708.700	1	Polisi	68.406.773	96,82%			27.187.633						
1.1.05		Perencanaan Operasional	117	ok	30.000.000	117	ok	31.551.000	105,16%			88.866.700		3.000.000	2.000.000			
1.1.06		Perencanaan Operasional	1	Polisi	793.800,00	1	Polisi	793.800,00	100,00%			33.000.000						
1.1.07		Perencanaan Operasional	12	Barisan	41.000.000	1	Polisi	41.000.000	100,00%							381.000		
1.1.08		Perencanaan Operasional	1	Polisi	13.494.400	1	Polisi	13.494.400	100,00%							83.000.000		
1.1.09		Perencanaan Operasional	1	Polisi	2.800.000	1	Polisi	2.800.000	100,00%							13.000.000		
1.1.10		Perencanaan Operasional	1	Barisan	63.000.000	1	Barisan	63.000.000	100,00%							3.000.000		
1.1.11		Perencanaan Operasional	1	Barisan	11.287.200	1	Barisan	8.600.000	100,00%									63.000.000
1.1.12		Perencanaan Operasional	1	Barisan	18.000.000	1	Barisan	10.070.000	56,00%					3.000.000	1.800.000			
1.1.13		Perencanaan Operasional	1	Barisan	18.000.000	1	Barisan	10.070.000	56,00%					3.000.000	1.800.000			
1.1.14		Perencanaan Operasional	1	Barisan	18.000.000	1	Barisan	10.070.000	56,00%					3.000.000	1.800.000			

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE KALURAHAN

Kabupaten : Wunung
 Kabupaten : Wonorejo
 Kabupaten : Gunungkidul
 Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Program	Kegiatan			Anggaran		
		Jenis	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah	Sumber Dana
1	PKH	Non Fisik	Kalurahan Wunung	305	KPM	Rp 7.220.000.000	Kemensos
2	Penelitian BPNT	Non Fisik	Kalurahan Wunung	439	KK	Rp 10.536.000.000	Kemensos
3	PAMSIMAS	fisik	Padukuhan Kamal	1	paket	Rp 400.000.000	APBN
4	Rehab Aspal	fisik	Padukuhan Kamal	204	m ²	Rp 197.400.000	APBD
5	Rehab Tingo	fisik	Padukuhan Kamal	1	paket	Rp 100.000.000	APSD
6	JUTT	fisik	padukuhan solka 2			Rp 95.000.000	APSD
Total						Rp 19.648.400.000	



BERITA ACARA
RAPAT/SIDANG PEMERINTAH KALURAHAN BERSAMA BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BPKal) WUNUNG KAPANEWON WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh Januari Tahun 2023 bertempat di Kantor / Balai Kalurahan Wunung, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, telah diadakan Rapat / Sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan Wunung dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) dalam rapat membahas masalah : Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wunung tahun Anggaran 2022.

Rapat dihadiri oleh Lurah, semua Unsur Pamong Kalurahan, Ketua BPK dan Anggota BPKal sebagaimana Daftar Hadir terlampir. Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut:

Menyetujui Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wunung tahun Anggaran 2022

Dengan kesimpulan rapat sebagai berikut :

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wunung tahun Anggaran 2022 agar segera dituangkan dalam Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wunung tahun Anggaran 2022

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Wunung, 30 Januari 2023

KETUA BPK WUNUNG



HARDO WAHYUDI

LURAH WUNUNG



SUDARTO

**DAFTAR HADIR SIDANG
PEMERINTAH KALURAHAN DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WUNUNG
TAHUN 2023**

No.	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDATANGAN
1	SUDARTO	Teguhan	Lurah	1
2	MAR'ATUS SHOLIAH	Kamal	Carik	2
3	SUMARYADI	Kamal	Ulu-Ulu	3
4	AGUNG KURNIAWAN	Wunung	Jaga Baya	4
5	SUWANDI	Soka II	Kamituwa	5
6	ISWALBUDI	Soka I	Tata laksana	6
7	TRI SUBEKTI	Teguhan	Danarta	7
8	TRI WURIANTO	Teguhan	Pangripta	8
9	SURATMAN	Kamal	Dukuh Kamal	9
10	SUTIRAH	Wunung	Dukuh Wunung	10
11	ASTHA TRI DASA ATMAJA	Teguhan	Dukuh Teguhan	11
12	KASDI	Soka I	Dukuh Soka I	12
13	WARDIYO	Soka II	Dukuh Soka II	13
14	WARSO MURSALIM	Soka II	Staf Kalurahan	14
15	WIWIN SUGIYANTI	Kamal	Staf Kalurahan	15
16	MUTMAINAH	Karangasem	Tenaga Kontrak	16
17	WASGITO	Teguhan	Tenaga Kontrak	17
18	HARDA WAHYUDI	Teguhan	Ketua BPKal.	18
19	WAGINO, SE	Teguhan	Wakil Ketua	19
20	RANI WIDYASTUTI	Kamal	Sekretaris	20
21	MUGIYARTO	Soka I	Kabid PPKal.PK	21
22	ICUK SUGIYARTO	Kamal	Kabid PDPMKal.	22
23	FEBRIANA SITI RAHMAWATI	Wunung	Anggota BPKal.	23
24	SURONO	Kamal	Anggota BPKal.	24
25	WIDARTO	Soka II	Anggota BPKal.	25
26	MUJI AMANTO	Wunung	Anggota BPKal.	26
27				27

